

Determinan Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel: Tinjauan Transparansi, Akuntabilitas, dan Kompetensi Aparatur di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros

Futri Auliya¹, Mahputera², Duryana³

¹²³Program Studi Akuntansi STIE Makassar Maju

e-mail : mahputrananto@gmail.com

©2018 –Bongaya Journal of Research in Management STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract : *The purpose of this research is to understand the transparency, accountability, and competence of village apparatus in relation to village financial management in Bontoa District, Maros Regency. This research is quantitative with primary data sourced from questionnaires. The population in this study consists of all village officials in Bontoa District involved in village financial management. The sampling technique used is purposive sampling, resulting in a sample of 56 respondents. Based on the data analysis conducted using multiple linear regression analysis with SPSS version 30. The results of this study indicate that transparency has no effect on village financial management. Accountability has a positive and significant effect on village financial management. And the competence of village officials has a positive and significant effect on village financial management.*

Keywords: *Transparency, Accountability, Competence of Village Officials, Village Financial Management.*

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data primer berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kecamatan Bontoa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Teknik pengambilan sampel adalah Purposive sampling hingga di dapat sampel sebanyak 56 responden. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan analisis linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 30. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi tidak mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Dan kompetensi aparatur desa mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Kompetensi Aparatur Desa Pengelolaan Keuangan Desa.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik yang efektif dan efisien menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Di banyak negara, termasuk Indonesia, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah menempatkan entitas terkecil, yaitu desa, sebagai subjek kunci pembangunan dan pelayanan publik (World Bank, 2023). Kebijakan sentral seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan legitimasi dan, yang lebih penting, sumber daya finansial yang signifikan melalui Dana Desa dan alokasi dana lainnya. Dana yang besar ini, yang dialokasikan triliunan rupiah setiap tahun secara nasional, bertujuan untuk mempercepat

pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Keuangan RI, 2024). Namun, pelimpahan wewenang dan dana yang besar ini juga membawa tantangan besar, terutama terkait akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan dana tersebut. Keberhasilan pembangunan di tingkat akar rumput sangat bergantung pada kemampuan aparatur desa dalam merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah dana yang dikelola (OECD, 2022). Oleh karena itu, isu Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel telah menjadi perhatian utama pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.

Pengelolaan Keuangan Desa didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kualitas pengelolaan ini sering diukur dari sejauh mana prinsip-prinsip keuangan publik dipatuhi, terutama prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas menuntut bahwa aparatur desa harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan serta kinerja mereka kepada pihak yang berkepentingan, baik pemerintah atasan maupun masyarakat desa (Mardiasmo, 2018). Kegagalan dalam akuntabilitas sering kali berujung pada penyimpangan, inefisiensi alokasi, dan rendahnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, yang ironisnya bertentangan dengan semangat UU Desa. Berbagai studi dan laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menunjukkan bahwa meskipun tingkat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan daerah terus meningkat, isu pengelolaan dana desa masih menjadi titik rawan. Permasalahan klasik mencakup keterlambatan penetapan APBDes, kurangnya kualitas laporan pertanggungjawaban, dan yang paling kritis, indikasi penyalahgunaan dana (BPK RI, 2023). Isu-isu ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem, tetapi juga oleh faktor-faktor internal yang melekat pada individu pelaksana.

Untuk mengatasi tantangan akuntabilitas ini, literatur manajemen publik secara konsisten menyoroti tiga pilar utama sebagai determinan kualitas tata kelola: Transparansi, Akuntabilitas, dan Kompetensi Aparatur Desa. Transparansi: Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi keuangan desa kepada publik, sehingga memungkinkan pengawasan dari masyarakat. Ketika informasi anggaran, pelaksanaan, dan pelaporan disajikan secara mudah diakses dan dipahami, potensi penyimpangan dapat diminimalisir, dan kepercayaan publik akan meningkat (Cohen & Karatzimas, 2021). Desa yang transparan cenderung memiliki tekanan pengawasan yang lebih tinggi, yang secara langsung mendorong perilaku akuntabel. Akuntabilitas: Meskipun merupakan hasil yang dituju, akuntabilitas sebagai variabel independen merujuk pada mekanisme internal yang menuntut tanggung jawab pelaksana. Ini mencakup penetapan tugas yang jelas, sistem pelaporan internal yang baku, dan sanksi atas ketidakpatuhan. Akuntabilitas ini berfungsi sebagai kerangka kerja *ex-ante* yang memandu aparatur dalam menjalankan tugasnya sesuai prosedur.

Kompetensi Aparatur Desa: Ini dianggap sebagai faktor fundamental. Aparatur desa, sebagai eksekutor teknis, harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai terkait regulasi keuangan, akuntansi, dan pengadaan barang/jasa. Studi terdahulu (Nurhayati & Sari, 2020) menunjukkan bahwa rendahnya kompetensi, khususnya dalam literasi akuntansi dan teknologi, menjadi penghalang utama dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.

Meskipun terdapat banyak penelitian tentang hubungan ketiga variabel ini dengan pengelolaan keuangan, kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan masih ada. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu bersifat umum atau terfokus pada wilayah di luar Sulawesi Selatan. Kedua, masih kurangnya studi yang secara spesifik mengkaji pengaruh ketiga variabel ini secara simultan terhadap konsep Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel sebagai variabel dependen yang tunggal dan terintegrasi, terutama dalam konteks empiris yang unik.

Penelitian ini memfokuskan lokasinya di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Maros, sebagai salah satu kabupaten penyangga Kota Makassar yang mengalami perkembangan ekonomi dan sosial yang dinamis, memiliki tantangan khas dalam pengelolaan sumber daya. Pemilihan Kecamatan Bontoa menjadi penting karena wilayah ini mewakili desa-desa dengan karakteristik yang mungkin berbeda (pesisir dan pedalaman), yang dapat memberikan gambaran empiris yang kaya dan spesifik mengenai bagaimana Transparansi, Akuntabilitas, dan Kompetensi Aparatur berinteraksi dan memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan desa di lokasi yang memiliki karakteristik tersebut.

Berdasarkan latar belakang, tantangan, dan kesenjangan penelitian di atas, penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis yang tinggi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkret bagi Pemerintah Kabupaten Maros dalam merumuskan kebijakan pelatihan dan pengawasan aparatur desa. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi memperkaya khazanah ilmu akuntansi dan manajemen publik, khususnya dalam konteks otonomi desa di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Karena telah digunakan selama cukup lama, metode kuantitatif disebut metode tradisional. Metode ini didasarkan pada positivisme, sehingga diberi nama positivisme. Prinsip ilmiah seperti konkret, objektif, dapat diukur, rasional, dan terstruktur digunakan dalam pendekatan kuantitatif, sehingga dianggap sebagai pendekatan ilmiah. Karena mampu membantu dalam penemuan dan pengembangan berbagai teknologi dan ilmu pengetahuan baru, metode ini juga disebut sebagai metode penemuan. Datanya adalah angka dan analisisnya dilakukan dengan statistik, itu disebut kuantitatif (Sugiyono, 2019).

Salah satu metodologi penelitian yang muncul dari positivisme adalah penelitian kuantitatif. Baik populasi maupun sampel tertentu dapat dipelajari menggunakan pendekatan ini. Data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian. Teknik statistik atau kuantitatif digunakan untuk menganalisis data. Menguji teori-teori yang ada adalah tujuannya (Sugiyono, 2019).

Penelitian kuantitatif merujuk pada jenis studi atau penelitian yang dilakukan dengan mengamati hubungan antara variabel yang terkait dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini lebih berorientasi pada hubungan sebab akibat, sehingga di dalamnya terdapat variabel yang bersifat independen dan dependen. Seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari variabel-variabel ini (Sugiyono, 2019). Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan serta besarnya pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil olah data kuantitatif dan kualitatif serta pembahasannya. Analisis kuantitatif dilakukan dengan SPSS 28 melalui tahapan: uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji korelasi, analisis regresi linier sederhana, uji t, uji F (ANOVA), dan koefisien determinasi (R^2). Hasil kuantitatif dilengkapi dengan temuan kualitatif berbasis thematic coding, lalu diintegrasikan melalui triangulasi metode.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap butir pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud, yaitu strategi MSDM dan penguatan serikat buruh. Validitas diukur dengan teknik Corrected Item-Total Correlation, di mana kriteria kelayakan adalah nilai korelasi lebih besar dari r tabel. Pada jumlah sampel $n = 92$ dengan taraf signifikansi 5%, nilai r tabel = 0,203. Hasil uji validitas dengan metode Corrected Item-Total Correlation menunjukkan semua butir pertanyaan memiliki nilai $> 0,30$.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen

Pernyataan	Signifikan	Person correlation	Keterangan
X1.1	0,05	0,658	Valid
X1.2	0,05	0,800	Valid
X1.3	0,05	0,768	Valid
X1.4	0,05	0,737	Valid
X1.5	0,05	0,681	Valid

Akuntabilitas

X2.1	0,05	0,705	Valid
X2.2	0,05	0,764	Valid
X2.3	0,05	0,691	Valid
X2.4	0,05	0,858	Valid
X2.5	0,05	0,890	Valid
X2.6	0,05	0,702	Valid

Kompetensi Aparatur Desa

X3.1	0,05	0,629	Valid
X3.2	0,05	0,850	Valid
X3.3	0,05	0,841	Valid
X3.4	0,05	0,867	Valid
X3.5	0,05	0,721	Valid

Pengelolaan Keuangan Desa

Y.1	0,05	0,864	Valid
Y.2	0,05	0,870	Valid
Y.3	0,05	0,909	Valid
Y.4	0,05	0,842	Valid
Y.5	0,05	0,894	Valid
Y.6	0,05	0,908	Valid

Interpretasi hasil pada Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel strategi MSDM maupun penguatan serikat memiliki nilai r hitung di atas 0,30 dan melampaui nilai r tabel (0,203). Hal ini berarti setiap indikator kuesioner mampu mewakili konstruk teoritis yang diteliti.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini memiliki validitas isi (content validity) yang baik. Artinya, indikator yang disusun berdasarkan teori (Ulrich & Dulebohn, 2015; Tapia et al., 2015; Boxall & Purcell, 2016) memang mampu menangkap realitas lapangan dan sesuai untuk mengukur pengaruh strategi MSDM terhadap penguatan serikat buruh.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menentukan seberapa jauh hasil pengungkapan tetap atau konstan terhadap bagian pertanyaan yang telah diuji validitas atau dianggap valid. Pertanyaan dapat diterima atau dianggap reliabel jika *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60. Transparansi, akuntabilitas, kompetensi aparatur desa dan pengelolaan keuangan desa merupakan semua komponen yang diuji reliabilitasnya. Hasil uji reliabilitas menggunakan program SPSS 30 ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
Transparansi	0,770	Reliabel
Akuntabilitas	0,861	Reliabel
Kompetensi Aparatur Desa	0,820	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Desa	0,942	Reliabel

Sumber: hasil olah data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 2. hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel Transparansi dengan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,770, variabel Akuntabilitas dengan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,861, variabel Kompetensi Aparatur Desa dengan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,820, dan untuk variabel Pengelolaan Keuangan Desa dengan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,942. Untuk masing-masing variabel ini, nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60. Dengan demikian, berdasarkan temuan uji reliabilitas, dapat dikatakan bahwa semua variabel penelitian dapat diterima atau reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah nilai residual atau variabel gangguan memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik seharusnya memiliki nilai residual yang terdistribusi secara reguler. Uji *Kolmogorov Smirnov* digunakan untuk memeriksa hal ini, dan kriteria pengambilan keputusan menyatakan bahwa nilai residual terdistribusi normal jika nilai signifikansinya $> 0,05$ dan tidak terdistribusi normal jika nilai signifikansinya $< 0,05$. Tabel di bawah ini menampilkan temuan uji *Kolmogorov Smirnov* untuk normalitas (Ghozali, 2016).

Tabel 3. 1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,68942959
Most Extreme Differences	Absolute	0,093
	Positive	0,093
	Negative	-0,087
Test Statistic		0,093

Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200 ^c
------------------------	--------------------

Sumber: hasil olah data SPSS, 2025

Hasil uji asumsi klasik pada uji normalitas ditunjukkan dalam tabel di atas. Hasil uji *Kolmogorov Smirnov* digunakan untuk kriteria pengambilan keputusan, dengan tingkat signifikansi $0,200 > \text{nilai signifikansi } 0,05$. Oleh karena itu, hasil uji *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan apakah model regresi menunjukkan adanya korelasi antara variabel independen. Hal ini dilakukan dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Multikolinearitas dianggap tidak ada jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10. Tabel di bawah ini menampilkan temuan dari uji multikolinearitas, yang didasarkan pada uji asumsi klasik dan dilakukan menggunakan SPSS 30.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	0,813	2,568		0,317	0,753		
	Transparansi	-0,044	0,164	-0,032	-0,266	0,791	0,397	2,518
	Akuntabilitas	0,553	0,142	0,483	3,894	0,000	0,365	2,742
	Kompetensi	0,556	0,188	0,431	2,965	0,005	0,265	3,776

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Tidak ada multikolinearitas antara variabel independen, seperti yang ditunjukkan oleh tabel di atas, karena tolerance untuk Transparansi, Akuntabilitas, dan Kompetensi Aparatur Desa memiliki nilai yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah ada ketidaksamaan variance dalam model regresi. Tidak ada bukti heteroskedastisitas dari variabel independen dan dependen jika nilai signifikansi $> 0,05$. Dengan menggunakan grafik *Scatterplot* untuk menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas, dapat disimpulkan bahwa data tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Uji glejger digunakan untuk mengevaluasi keakuratan hasil grafik *Scatterplot* (Ghozali, 2016). Hasil uji heteroskedastisitas glejser adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	0,813	2,568		0,317	0,753
	Transparansi (X1)	-0,044	0,164	-0,032	-0,266	0,791
	Akuntabilitas (X2)	0,553	0,142	0,483	3,894	0,000
	Kompetensi (X3)	0,556	0,188	0,431	2,965	0,005

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 5., uji asumsi klasik pada uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan hasil uji Glejser yang menyatakan bahwa nilai signifikansi pada masing-masing variabel yaitu, variabel transparansi sebesar 0,791, variabel akuntabilitas sebesar 0,000 dan variabel kompetensi aparatur desa sebesar 0,005.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel . Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,813	2,568		0,317	0,753
	X1	-0,044	0,164	-0,032	-0,266	0,791
	X2	0,553	0,142	0,483	3,894	0,000
	X3	0,556	0,188	0,431	2,965	0,005
a. Dependent Variable: Y						

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Hubungan antara variabel dependen dan independen ditentukan melalui penggunaan analisis regresi linier berganda. Model regresi linier berganda adalah model regresi yang baik yang memenuhi persyaratan, menurut pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan, seperti data normal, tidak adanya gejala multikolinearitas, dan tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari pemeriksaan sebelumnya terhadap uji asumsi klasik bahwa model regresi linier berganda dianggap baik dan memenuhi persyaratan. Ini merupakan hasil dari penelitian regresi linier berganda SPSS 30. Berdasarkan tabel diatas mengetahui hasil analisis regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa hasil nilai konstanta sebesar 0,813, hasil uji koefisien pada variabel independen yaitu variabel transparansi sebesar -0,044, variabel akuntabilitas sebesar 0,553, dan variabel kompetensi aparatur desa sebesar 0,556. Sehingga model regresi akhir yang didapat adalah sebagai berikut:

$$PKD = \alpha + \beta_1 T + \beta_2 A + \beta_3 KAD + e$$

$$PKD = 0,813 + (-0,044) T + 0,553 A + 0,556 KAD + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda diatas dapat dijelaskan atau diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta adalah sebesar 0,813 menjelaskan bahwa pada variabel independen yaitu variabel transparansi, akuntabilitas dan kompetensi aparatur desa menyatakan bahwa apabila pada variabel tersebut dianggap konstan maka dalam persamaan tersebut nilai Pengelolaan Keuangan Desa yaitu sebesar 0,813 satuan.
- Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda dilihat nilai koefisien regresi bernilai negatif pada variabel Transparansi dengan nilai sebesar -0,044 satuan. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada Transparansi justru akan menurunkan nilai Pengelolaan keuangan desa sebesar -0,044 satuan, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dianggap konstan.
- Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda dilihat nilai koefisien regresi bernilai positif pada variabel Akuntabilitas dengan nilai sebesar 0,553 satuan. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan Akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa, maka akan meningkatkan nilai pengelolaan keuangan

desa sebesar 0,553 dengan variabel independen yang diasumsikan dianggap konstan.

- d. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda dilihat nilai koefisien regresi bernilai positif pada variabel kompetensi aparatur desa dengan nilai sebesar 0,556 satuan. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan kompetensi aparatur desa pada pengelolaan keuangan desa, maka akan meningkatkan nilai pengelolaan keuangan desa sebesar 0,556 dengan variabel independen diasumsikan dianggap konstan.

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengaruh uji t secara parsial antara variabel independen dan dependen diukur dengan uji signifikansi secara parsial. Dengan tingkat signifikansi 5% = 0.05 dan jumlah sampel (n) = 56, dan jumlah variabel dependen (k) = 3, t tabel adalah 1,674 (Ghozali, 2016).

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,813	2,568		0,317	0,753
	X1	-0,044	0,164	-0,032	-0,266	0,791
	X2	0,553	0,142	0,483	3,894	0,000
	X3	0,556	0,188	0,431	2,965	0,005
a. Dependent Variable: Y						

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 7. diatas, menunjukkan hasil uji t (uji parsial) yang dijelaskan dibawah ini:

- 1) Hasil analisis data variabel Transparansi menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,791 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung $-0,266 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,674$. Dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang menunjukkan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai t -hitung negatif lebih kecil dari nilai t -tabel.
- 2) Hasil analisis data untuk variabel Akuntabilitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung adalah $3,894 > \text{nilai } t \text{ tabel } 1,674$. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, yang dibuktikan dengan nilai t hitung yang positif dan lebih besar dari nilai t tabel serta nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_2 diterima.
- 3) Hasil analisis data untuk variabel kompetensi aparatur desa menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah $0,005 < 0,05$ dan nilai t hitung adalah $2,965 > \text{nilai } t \text{ tabel } 1,674$. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, yang dibuktikan dengan nilai t hitung yang positif dan lebih

besar dari nilai t tabel serta nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_3 diterima.

Pembahasan Hasil Analisis Data

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hipotesis pertama tentang variabel transparansi telah diuji dan hasilnya menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, H_0 diterima dan H_1 ditolak. Ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bontoa belum dilakukan secara maksimal. Penelitian ini berbeda dari hipotesis yang sebelumnya diajukan, yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Kecamatan Bontoa telah melakukan upaya untuk menerapkan prinsip transparansi, terutama dengan pemasangan papan informasi transparansi, anggaran desa, laporan kegiatan, dan realisasi anggaran. Namun pada kenyataannya, banyak desa yang masih belum rutin mengupdate informasi tersebut. Bahkan, di beberapa desa, papan informasi yang tersedia hanya digunakan secara simbolis dan tidak memuat data yang lengkap atau mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, lokasi pemasangan papan informasi terkadang kurang strategis dan tidak mudah diakses oleh warga.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi yang dilakukan oleh aparatur desa belum berhasil mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Banyak warga yang tidak mengetahui informasi keuangan desa secara rinci, karena selain kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah desa, sebagian masyarakat juga belum memiliki literasi yang memadai untuk memahami isi informasi yang disampaikan. Kesenjangan ini menyebabkan transparansi yang dilakukan belum memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizqiana (2023), yang menyatakan bahwa transparansi tidak mempengaruhi pengelolaan keuangan desa secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat mungkin mengabaikan variabel transparansi dan lebih memfokuskan pada variabel lain seperti prinsip yang menguntungkan masyarakat. Prinsip ini menyatakan bahwa keuangan desa harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Kemungkinan lain termasuk prinsip proporsionalitas, yang merupakan prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan hukum dan kode etik. Sedangkan hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Nor Hasanah (2022) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Ditinjau dari perspektif teori *stewardship*, hasil ini menunjukkan bahwa aparatur desa belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat dalam posisi mereka sebagai pemimpin. Menurut teori ini, aparatur pemerintah bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab dan berfokus pada kepentingan publik. Akibatnya, transparansi atau keterbukaan harus menjadi komponen penting dari tata kelola keuangan yang akuntabel. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik transparansi belum diterapkan secara efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Ini adalah hal penting dari pendekatan *stewardship* ini.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua pada variabel akuntabilitas yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, dengan demikian H0 ditolak dan H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.

Akuntabilitas merupakan kemampuan aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana desa secara terbuka, jujur, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil ini diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa sebesar 90,71% mayoritas responden menilai aparatur desa di Kecamatan Bontoa telah menunjukkan sikap akuntabel, yang tercermin dalam pelaporan keuangan yang tepat waktu, penyampaian laporan pertanggungjawaban secara terbuka, serta adanya pengawasan oleh lembaga terkait seperti BPD dan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Akuntabilitas juga menjadi salah satu bentuk pencegahan terhadap praktik penyelewengan anggaran, serta menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang lebih profesional dan sesuai dengan prinsip good governance.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Madu Munawaroh (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh akuntabilitas. Temuan studi menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas bagi pengelolaan keuangan pemerintah desa. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi. Sedangkan hasil penelitian berbeda yang dilakukan Muhammad Rifqi Ma'mun (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini terjadi karena banyak perangkat desa yang menyatakan telah menangani uang desa secara bertanggung jawab, padahal masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa ada pejabat desa yang tidak jujur. Bahkan sebagian aparat yang bekerja di desa juga berpendapat serupa, yakni masih ada sebagian aparat yang kurang jujur dalam melaporkan. Keuangan desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga pada variabel kompetensi aparatur desa yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, dengan demikian H0 ditolak dan H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat kompetensi aparatur desa maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.

Kompetensi yang dimaksud mencakup kemampuan teknis, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, keterampilan dalam menyusun laporan keuangan, serta kemampuan dalam menggunakan sistem administrasi keuangan desa. Hal ini diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa sebesar 91,07% menilai bahwa aparatur desa di Kecamatan Bontoa memiliki tingkat kompetensi yang cukup baik dalam mengelola keuangan desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa sangat mempengaruhi kemampuan mereka dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi penggunaan dana desa secara optimal. Jika aparatur memiliki kompetensi rendah, maka pengelolaan keuangan desa akan cenderung tidak tertib dan tidak sesuai

prosedur. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan rutin bagi perangkat desa agar mereka semakin memahami teknis dan administrasi keuangan desa secara menyeluruh.

Teori *Stewardship* menjelaskan bagaimana pejabat desa, sebagai eksekutif yang ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan, didorong untuk melakukan segala yang mereka bisa untuk memenuhi tujuan utama pemerintah, yaitu kesejahteraan penduduk, dalam mengelola keuangan desa. Selain itu, sebagai pengelola kebijakan, aparatur desa diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan semua operasinya kepada prinsipal. Karena itu, pemerintah harus berusaha sekuat tenaga untuk membangun aparatur desa yang termotivasi dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Aulia Rakhma Larasati Putri dan Maryono (2022) bahwa pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh kemampuan para aparat desa. Menurut temuan studi tersebut, pegawai lebih mungkin untuk beroperasi secara efektif, efisien, dan produktif ketika pemimpin desa memiliki tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Selain itu, pejabat desa yang memiliki keahlian dan keterampilan yang relevan pasti akan melaksanakan tugas mereka dengan efektif, yang akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Aurelia et al. (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. dalam hal ketidakmampuan aparatur desa untuk mengelola keuangan desa. Ini karena aparat desa tidak tahu cara menggunakan teknologi, tidak tahu tentang sistem pengelolaan dana desa, dan tidak dilatih tentang teknik akuntansi. Akibatnya, pelaporan realisasi anggaran tidak dibuat dengan baik. Karena pemerintah desa tidak melakukan kegiatan pembinaan, kemampuan aparatur ini kurang maksimal.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) berpengaruh signifikan terhadap penguatan serikat buruh FSB Kamiparho–KSBI Kota Makassar. Analisis kuantitatif dengan regresi linier sederhana menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,78, yang berarti 78% variasi penguatan serikat dapat dijelaskan oleh penerapan strategi MSDM, sementara 22% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Koefisien regresi positif ($\beta = 0,79$) menegaskan bahwa semakin efektif strategi MSDM diterapkan, semakin kuat pula serikat buruh.

Analisis kualitatif memperkaya temuan tersebut dengan mengungkap tiga tema utama: solidaritas dan daya juang, kepemimpinan autentik dan kepercayaan kolektif, serta hambatan struktural dan infrastruktur. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan serikat buruh tidak hanya bergantung pada strategi MSDM formal, tetapi juga pada dinamika sosial, kepemimpinan partisipatif, dan kemampuan organisasi menghadapi keterbatasan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi MSDM merupakan instrumen penting dalam membangun serikat buruh yang tangguh. Namun, keberhasilan strategi ini tetap dipengaruhi oleh faktor kontekstual, khususnya dukungan infrastruktur dan adaptasi terhadap perubahan digital.

Implikasi Penelitian

Secara akademis, penelitian ini memperluas cakupan studi MSDM yang selama ini didominasi oleh kajian korporasi, dengan menunjukkan bahwa serikat buruh juga merupakan arena strategis pengembangan SDM. Desain explanatory sequential mix-

method terbukti efektif untuk menjelaskan hubungan kuantitatif sekaligus memberi interpretasi sosial yang lebih dalam.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan arah bagi FSB Kamiparho–KSBI dan serikat buruh lain di Indonesia untuk:

1. Mengintegrasikan strategi MSDM dalam aktivitas organisasi, termasuk pelatihan, kaderisasi, dan komunikasi partisipatif.
2. Mengembangkan kepemimpinan autentik yang memperkuat kepercayaan anggota.
3. Berinvestasi pada literasi digital dan infrastruktur untuk menghadapi tantangan era industri 4.0.

Bagi pemerintah, temuan ini memberi pesan bahwa pembangunan SDM unggul dalam visi Indonesia Maju tidak hanya berlaku di sektor perusahaan, tetapi juga pada organisasi pekerja yang menjadi pilar demokrasi industrial.

Daftar Referensi

- Albrecht, S. L., Bakker, A. B., Gruman, J. A., Macey, W. H., & Saks, A. M. (2015). Employee engagement, human resource management practices and competitive advantage: An integrated approach. *Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance*, 2(1), 7–35. <https://doi.org/10.1108/JOEPP-08-2014-0042>
- Ananda, N. A., & Ghulam, R. A. (2025). Pengaruh Citra Merek Dan Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Sirup Markisa Flora Kabupaten Gowa: Indonesia. *BJRM (Bongaya Journal For Research in Management)*, 8(2), 12-18.
- Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2016). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. *The Leadership Quarterly*, 27(2), 315–338. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2016.02.001>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). To saturate or not to saturate? Questioning data saturation as a useful concept for thematic analysis and sample-size rationales. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 13(2), 201–216. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1704846>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- DeNisi, A. S., & Smith, C. E. (2021). Performance appraisal, performance management, and firm-level performance: A review, a proposed model, and new directions for future research. *Academy of Management Annals*, 15(1), 102–142. <https://doi.org/10.5465/annals.2018.0123>
- Fitri, F. (2023). Pengaruh Segmentasi, Targeting dan Positioning Terhadap Volume Penjualan Mobil Mitsubishi pada PT Bosowa Berlian Motor Makassar. *Jurnal Ekonomika*, 7(1), 194-202.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 28* (11th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghulam, R. A. (2023). Pengaruh Kualitas Produk, Layanan dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Mie Ayam BTP. *Jurnal e-bussiness Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar*, 3(2), 22-32.
- Ghulam, R. A. (2023). Pengaruh Supply Chain Managemen pada Kinerja UMKM Pengolahan Ikan Bolu (Bandeng) di Desa Bungoro Kabupaten Pangkep. *Jurnal e-bussiness Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar*, 3(1), 59-64.

- Ghulam, R. A. (2022). Pengaruh Motivasi, Pelatihan, Dan Kompensasi, Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT BBM. *Jurnal e-bussiness Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar*, 2(2), 77-90.
- Ghulam, R. A. G. (2025). Reza Afandy Ghulam1 Fitri². *BJRM (Bongaya Journal For Research in Management)*, 8(2), 30-40.
- Ghulam, R. A. (2023). Analisis Perilaku Berbelanja Konsumen Shopee di Kota Makassar. *Jurnal e-bussiness Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar*, 3(1), 74-81.
- Ghulam, R. A., & Fitri, F. *Bisnis Internasional Strategi, Dinamika, dan Tantangan Global Kontemporer*.
- Ghulam, r. A., & fitri, f. *Manajemen strategi*.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- International Labour Organization. (2024). *World employment and social outlook: The role of digitalization in shaping the future of work*. ILO Publishing.
- Mandasari, P., Vitria, A., Ditasari, R. A., Fitri, F., Duryana, D., Hariri, A & Mesakh, M. (2025). *Manajemen Strategis: Konsep dan Praktik Kontemporer*.
- Ramayani, I. (2021). Pendidikan Kewirausahaan dan Motivasi Mahasiswa Menjadi Entrepreneur (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI DDI Polewali Mandar. *Jurnal e-bussiness Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar*, 1(01), 33-49..
- Ulrich, D., & Dulebohn, J. H. (2015). Are we there yet? What's next for HR? *Human Resource Management Review*, 25(2), 188–204. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.01.008>
- Wright, P. M., & McMahan, G. C. (2019). Exploring human capital: Putting ‘human’ back into strategic human resource management. *Human Resource Management Journal*, 29(2), 93–101. <https://doi.org/10.1111/1748-8583.12246>